

REALITAS PENDIDIKAN NILAI DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Sulton

Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : sulton@umpo.ac.id

ABSTRAK

Fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang sedang terjadi telah memicu terjadinya krisis nilai dan moral di negeri ini. Maraknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, pembunuhan, perkelahian, tawuran, penganiayaan, penipuan, penyuapan, penggelapan, mafia hukum, makelar kasus dan krisis nilai serta moral lainnya adalah salah satu penanda. Disamping faktor eksternal, faktor internal bernama pendidikan nilai dan moral baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat diyakini menjadi penyebab utamanya. Saat ini eksistensi pendidikan nilai pada tiga gatra pendidikan tersebut memang sedang dilanda krisis dan mendesak untuk dikaji serta dikembalikan perannya. Keluarga tidak boleh hanya menjadi simbol keterikatan anggotanya, tetapi harus mengambil peran pertama dan utama dengan orang tua sebagai anggota utamanya untuk melakukan transformasi nilai dan moral kepada anak-anak. Sementara sekolah, lebih dari sekedar mengejar target prestasi akademiknya, juga dituntut untuk mendesain keseluruhan programnya terintegrasi dengan agenda pendidikan nilai dan moral yang diperlukan anak-anak. Sedangkan masyarakat, tentu diharapkan dapat menjadi rumah besar bagi tumbuh dan berkembangnya pranata nilai yang menjadi sandaran dan orientasi nilai dan moral oleh anggotanya termasuk anak-anak. Untuk itulah, melalui regulasi dan kebijakannya pemerintah diharapkan mengambil peran dalam membimbing dan mengawal proses transformasi nilai dan moral pada tiga gatra pendidikan dimaksud. Sementara para elite dan segenap stakeholders pendidikan nilai seperti orang tua, guru, dan para tokoh diharapkan dapat memberikan contoh dan keteladanan yang baik, sebagai salah satu bentuk praktis dalam memberikan pemahaman, pembimbingan, dan penyadaran dalam kerangka penanaman nilai dan moral yang ada.

Kata kunci: Pendidikan Nilai, Keluarga, Sekolah, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Menghadapi persaingan global termasuk memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean yang telah dicanangkan akhir Desember 2015 lalu, setiap negara-bangsa termasuk Indonesiadituntut untuk memperkuat eksistensi masyarakat dan generasi mudanya guna memenangkan persaingan dan mengkokohkan eksistensinya diantara masyarakat bangsalainnya. Yaitu suatu komunitas masyarakat dan generasi muda yang memiliki integritas dan karakter yang kuat sertakemampuan dan daya saing yang tinggi dalam berkompetisi dengan

masyarakat bangsa-bangsa lainnya. Potret masyarakat Indonesia dalam persepsi bangsa-bangsa lain di dunia yang identik dengan nilai-nilai “ketimurannya” yang berbudi-pekerti, ulet dan pekerja keras, berbudaya, serta beradab seharusnya dijaga, dipertahankan dan dikembangkan potensinya. Karena inilah karakter yang dapat menjadi identitas diri secara bermakna dalam pergaulan, dinamika, dan kompetisi diantara masyarakat bangsa-bangsa lainnya.

Itulah profil masyarakat dan generasi muda Indonesia yang kita butuhkan dalam kanca persaingan dan

kompetisi antara bangsa saat ini. Masalahnya seperti peribahasa “jauh panggang dari api”, dinamika masyarakat dan generasi muda Indonesia dalam beberapa tahun akhir-akhir ini menampakkan gejala dan kecenderungan yang sangat mengkhawatirkan. Profil masyarakat dan generasi muda Indonesia yang berkarakter, memiliki integritas, dan berdaya saing tinggi sebagaimana potret ideal yang diinginkan semakin jauh dari harapan. Gejala dan kecenderungan yang terjadi menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat mulai dari kelompok masyarakat elite sampai dengan rakyat biasa, yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, yang tuadan yang muda, demikian juga yang tinggal di kotadandesa, semuanya sedang mengalami disorientasi, distorsi, dan dekadensi mental, etik dan moral. Terjadi kecenderungan yang kian menguat pada berbagai aspek kehidupan, dimana dalam interaksi dan dinamika kehidupannya, masyarakat mudah sekali mengabaikan nilai, norma, moral, budi pekerti, akhlak dan tata-krama pergaulan yang baik, yang diperlukan dalam sebuah tatanan masyarakat beradab. Fenomena dan kecenderungan ini difahami sebagai proses demoralisasi dan dehumanisasi masyarakat.

PEMBAHASAN

Proses Demoralisasi Masyarakat

Demoralisasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai fenomena maraknya berbagai tindak a-moral yang terjadi ditengah-tengah masyarakat atas standarnilai dan moral yang dibangun dari sistem nilai yang telah disepakati bersama. Pelanggaran nilai dan moral yang terjadi disebabkan karena masyarakat mulai acuh tak acuh dan tidak mempedulikan sistem nilai dan moral yang selama ini dijunjung tinggi. Selanjutnya masyarakat beralih kearah standarisasi nilai dan moralitas

baru yang dianggap memenuhi kepentingan mereka, yang serba individualis, pragmatis, dan materialis.

Wajah asli masyarakat Indonesia yang bermoral, berkarakter dan berbudaya sebenarnya bukanlah cerita dan legenda masa lalu, melainkan realitas yang berkembang kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Menghadapi arus globalisasi dengan mesin penggerak ideologi liberalnya yang mewujud dalam berbagai teori dan konsep ilmu pengetahuan, produk-produk teknologi tinggi, sampai produk kebutuhan harian, membuat masyarakat bangsa ini seolah tidak berdaya. Bangunan karakter dan moralitas masyarakat bangsa ini sedikit demi sedikit terkikis karena erosi dan hempasan dahsyat gelombang globalisasi yang bersifat materialistis-hedonis-individualis.

Krisis moral dan budi pekerti melanda para pemimpin negeri ini berimbas pada moralitas masyarakat dan generasi muda kita. Fenomena maraknya korupsi, kebohongan dan pembodohan publik, serta tindak a-moral lainnya adalah contoh buruk bagi masyarakat dan generasi muda Indonesia. Sejurus kemudian juga berkembang fenomena maraknya pemerkosaan, porno aksi dan pornografi, pembalakan liar, pembakaran hutan, perampokan, penggunaan dan pengedaran NAZA/obat psikotropika di tengah-tengah kehidupan masyarakat, melibatkan seluruh lapisan mulai dari para publik figur, orang tuabahkan sampai para remaja. Sementara itu perilaku buruk sebagian siswa sekolah juga melanda seluruh penjuru wilayah Indonesia. Tawuran antar pelajar menjadi menu berita harian media massa, yang dilakukan bukan hanya oleh anak lelaki tetapi juga melibatkan “gank-gank” anak perempuan. Bahkan perilaku seks bebas, pelecehan seksual, dan perilaku a-moral lainnya telah

merambah sampai ke pelosok-pelosok desa.

Begitu banyak dan seringnya fenomena tindakan a-moral itu terjadi, kemudian menjadi biasa kita saksikan tanpa mampu mengusik kesadaran kolektif moral masyarakat. Semuanya terjadi dan berlangsung begitu saja, tidak ada kekhawatiran yang menyeruak, seolah segenap komponen masyarakat bangsa ini memaklukkannya, menerimanya, dan tak berdaya untuk sekedar mereaksi sebagai bentuk perlindungan diri yang terlemah. Bahkan beberapa komponen masyarakat diantaranya kemudian menjadi pembela ideologi liberalis-individualis yang paling fanatik melebihi masyarakat barat yang menjadi ibu kandung ideologi atau faham tersebut.

Proses Dehumanisasi Masyarakat

Dehumanisasi adalah perwujudan sempurna dari wajah demoralisasi. Dalam kaitan ini ini difahami sebagai tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung mengabaikan dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan sebagai kebutuhan dasar yang harusnya dijunjung tinggi secara universal oleh masyarakat bangsa di seluruh dunia. Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dalam konteks Hak Asasi Manusia telah menjadi isu internasional, karenanya semua bangsa berkepentingan untuk menjaganya. Bangsa Indonesia dalam sejarahnya termasuk bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penegasan diri sebagai bangsa yang beragama, penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa serta penegasan atas perlindungan nilai-nilai dasar kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan ideologis dan konstitusional bagaimana komitmen masyarakat bangsa Indonesia

terhadap nilai-nilai kemanusiaan tersebut.

Kini setelah 70 tahun merdeka, masyarakat Indonesia dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang semakin individualitis dan pragmatis, memaksa mereka meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa yang selama ini dijunjung tinggi termasuk didalamnya nilai-nilai kemanusiaan. Maraknya berbagai kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, perdagangan anak dan wanita, praktek perbudakan, tindak kekerasan-anarkhis-terorisme, serta pertikaian antar kelompok yang memakan banyak korban secara langsung menandai kecenderungan masyarakat yang sedang mengalami proses dehumanisasi. Sementara itu berbagai tindak korupsi oleh para pejabat, persengkongkolan politik yang dirancang untuk merampas uang Negara dan hak-hak rakyat, penghamburan uang rakyat oleh oknum wakil rakyat atas nama studi banding dan dana bansos, panggarongan uang rakyat dalam kasus mafia pajak, jual-beli perkara dalam praktek mafia hukum adalah bentuk lain yang secara tidak langsung menggambarkan terjadinya proses dehumanisasi pada masyarakat bangsa ini.

Semua lapisan masyarakat dijejali fenomena kasus-kasus dimaksud oleh media massa sebagai sarapan paginya. Ada perdebatan di tengah masyarakat dan ada reaksi dari aparat, tetapi fakta demi fakta terus terjadi menambah daftar panjang proses dehumanisasi masyarakat, seolah semuanya dibolehkan dan dibenarkan terjadi begitu saja. Disebut sebagai kecenderungan dehumanisasi karena berbagai penyakit sosial tersebut benar-benar telah membunuh akar nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dilindungi oleh pranata hukum dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Urgensi Pendidikan Nilai

Tanpa bermaksud mengabaikan besarnya pengaruh faktor-faktor eksternal seperti : kuatnya arus globalisasi, faham liberalisme, materialisme, pragmatisme, dan individualisme sebagaimana dimaksud. Maraknya fenomena tindak pelanggaran nilai dan a-moral tersebut, salah satu sebabnya dapat dialamatkan pada kegagalan pendidikan nilai dan moral baik di tingkat pendidikan in-formal (keluarga), formal (sekolah) maupun nan-formal (masyarakat).

Menurut Mulyana (2004), pendidikan nilai dalam kaitan ini dapat dimaknai sebagaisebuah proses: (a) penanaman dan pengembangan nilai dan moralitas pada diri anak; (b) bantuan terhadap anak, agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta penempatannya secara integral dalam hidupnya; (c) pengajaran atau bimbingan kepada anak agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten (Suyanto: 2012). Dalam pengertian demikian, pendidikan nilai pada dasarnya merupakan proses transformasi nilai pada diri anak yang di dalamnya meliputi proses learning to know, to do, to be, dan to leave together atas nilai-norma yang ditanamkan pada seluruh lingkungan pendidikan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat.

Berangkat dari makna dimaksud, jelaslah bahwa pendidikan nilai dan moral, bukanlah proses pengajaran semata atas ayat, dalil, teori atau konsep apapun namanya. Tetapi menurut Barlow, adalah proses dimana sebagian besarnya dipelajari manusia melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku (role playing). Selanjutnya, menurut teori belajar sosial atas proses perkembangan sosial dan moral anak ditekankan pada perlunya conditioning (pembiasaan merespon) dan imitation (peniruan). Pembiasaan merespon tersebut melalui pemberian

penghargaan dan hukuman (Sugihartono, 2007). Dalam kaitan ini, Bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap dan reaksi emosi yang lain. Di dalam teorinya, Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa moral tidak bisa hanya diajarkan, tetapi moral harus ditanamkan melalui proses imitasi atau keteladanan.

Dalam konteks makna pendidikan nilai dimaksud, maka pendidikan nilai dan moral yang ideal, pada dasarnya bertumpu pada proses meniru dan keteladanan yang berlangsung pada pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat dimana anak-anak itu hidup dan tinggal. Karena itu penting sekali meninjau kembali keberadaan pendidikan nilai pada tiga gatra pendidikan dimaksud, apalagi dikaitkan dengan proses demoralisasi dan dehumanisasi masyarakat sebagaimana telah ditegaskan diatas.

Realitas Pendidikan Nilai di Lingkungan Keluarga

Keluarga, yaitu tempat dimana anak-anak tinggal bersama orang-orang terdekatnya pada dasarnya adalah institusi pendidikan nilai-moral yang pertama dan utama bagi anak. Melalui keluarga, untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada anak berbagai konsepsi pengetahuan tentang kehidupan berikut nilai dan moralitas yang harus dijunjung tinggi. Keluarga juga memegang peran dominan dalam menanamkan nilai dan moralitas, sebagai dasar kehidupan bagi anak-anak, disamping kenyataan bahwa waktu terbesar mereka memang dihabiskan bersama keluarga.

Urgensi pendidikan nilai dan moral dalam keluarga, dengan demikian sedikitnya didasarkan pada dua alasan,

yaitu : Pertama, karena keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak; Kedua, ditinjau dari frekuensi waktu, anak-anak lebih banyak tinggal dan menghabiskan waktunya bersama keluarga.

Posisi keluarga, memang memiliki peran yang strategis dalam meletakkan landasan nilai dan moralitas anak. Melalui orang tua sebagai anggota inti keluarga, anak menemukan “model” atau panutan pertama dan utama, terutama dari sosok orang tua (ayah dan ibu) sebagai individu yang bertanggung jawab atas pendidikan nilai dan moralitas anak. Dalam kaitan ini, menurut Pestalozzi (Badruzaman, 2008) keluarga merupakan cikal bakal pendidikan yang pertama, sehingga orang tua terutama seorang ibu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan dasar-dasar pendidikan nilai dan moralitas yang pertama bagi anaknya. Ini berarti lingkungan keluarga memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kepribadian seorang anak pada awal kehidupannya.

Kasih sayang dan keteladanan yang didapatkan seorang anak dalam lingkungan keluarga akan membantunya dalam pengembangan kepribadiannya. Karena itu intensitas dan kualitas interaksi serta komunikasi antara anak dengan orang tua pada saat ini harus menjadi fokus perhatian dan menuntut frekuensi yang proporsional.

Kegiatan pendidikan nilai dan moralitas dalam keluarga, diantaranya meliputi : proses penanaman keyakinan agama, nilai moral, nilai budaya, dan aspek kehidupan kerumahtanggaan. Proses pendidikannya akan berlangsung melalui panutan, pembinaan atau pembimbingan dari orang tua sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Karena itulah relevan pandangan yang dinyatakan oleh Pogglar (Hufad, 1997) bahwa pendidikan di dalam keluarga bukanlah pendidikan yang diorganisasikan tetapi merupakan proses

pendidikan ‘organik’ yang didasarkan pada spontanitas, intuisi, pembiasaan dan improvisasi. Ini berarti bahwa pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua melalui pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak.

Sementara itu Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa alam keluarga bagi setiap orang adalah alam pendidikan permulaan. Melalui keluarga untuk pertama kalinya orang tua bertindak sebagai penuntun (guru), sebagai pengajar dan sebagai pemimpin pekerjaan (pemberi contoh). Juga, di dalam keluarga pula setiap anak berkesempatan mendidik diri sendiri, melalui macam-macam kejadian yang sering memaksa sehingga dengan sendirinya menimbulkan pendidikan diri sendiri (Syalabi, 1997).

Dengan demikian, keluarga sebagai lembaga pendidikan non formal mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai dan moralitas pada anak sebelum masuk level pendidikan formal. Orang tua sebagai penanggung jawab utama dalam menanamkan nilai-nilai paling dasar sebelum anak masuk dalam komunitas berikutnya menjadi kata kuncinya. Dalam urgensinya sekaligus untuk mendorong upaya pencapaian tujuan pendidikan nilai dan moral, sudah saatnya keberadaan pendidikan dalam keluarga dikaji secara serius dan menjadi focus oriented dalam proses pendidikan nilai dan moralitas bagi anak, sementara pendidikan formal berikutnya bersifat pengembangan.

Ditengah harapan dan idealitas atas keberadaan pendidikan nilai dan moral dalam keluarga, realitas di masyarakat menunjukkan, bahwa institusi keluarga sedang mengalami krisis dan dis-orientasi baik dalam kaitannya dengan interaksi antar anggota keluarga maupun dalam membangun pranata kehidupan keluarga termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan nilai dan moral bagi anak-

anaknyanya. Kebanyakan orang tua berasumsi, bahwa suksesnyamasa depan anak sangat terkait dengan prestasi akademik di sekolah serta sederet predikat kejuaraanlainnya.

Asumsi ketercukupan materi dan prestasi akademik anak, kemudian menjadi acuan orang tua akan jaminan sukses masa depan anak-anaknya, sehingga mereka rela melakukanapa saja untuk tercapainya asumsi tersebut. Akibatnya mudah diduga, banyak orang tua terfokus berakselerasi dan bekerja dalam asumsi materialis dan formalitas dimaksud. Anak-anak memang terpenuhi kebutuhan materinyabahkan mungkin prestasi akademiknya,tetapi mereka berada dalam jebakan kesendirian tanpa kehadiran orang tuanya dengan segenap kasih sayang dan peran pendidikan nilainya karena harus meninggalkan rumah –bekerja penuh waktu, menjadi pekerja urban, menjadi TKI– untuk menghimpun kapital bagi ketercukupan materi dan pendidikan anaknya.Karena itu Suyanto (2001), menyatakan penyebab utama rendahnya moral anak adalah semakin longgarnya peran orang tua dalam kontak keseharian, baik dari aspek frekuensi, aspek intensitas, maupun aspek kualitas komunikasi. Hal ini memang pantas untuk dipertanyakan, karena ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan kesibukan orang tua bekerja, teknik komunikasi, dan substansi komunikasinya.

Sementara itu suasana psikologis dengan ikatan emosional sebagai sebuah keluarga, proses transformasi nilai dan moralitas, seringkali juga dimaklumkan pengabaianya dan hanya dipandang sebagai pelengkap yang cukup diperoleh anak-anak melalui nasehat para da'i di majelis taklim atau guru agama di sekolah.Tidak ada proses transformasi psikologis dan nilai-norma-moral yang menjadi orientasi, sandaran, standar, bahkan pengikat pranata keluarga tersebut, sehingga anak-anakatau

anggota keluarga lainnya menentukan sendirisandaran dan standarmoralitas hidupnya melalui televisi, internet, teman pergaulannya, dan lingkungan hidupnya yang kian materialis dan hedonis. Orang tua yang seharusnya menjadi “model”atau contoh dalam pembentukan mentalitas dan moralitas anaknya tidak hadir dan mencukupkan perannya dengan memproduksi dan menyediakan materi atau sarana. Jadilah kita menemukan anak-anak yang seharusnya memilikikekokohan mental dan moralitasnya, berubahmenjadi sosok yang rapuhdan tidak peduli akan masa depannya.

Realitas Pendidikan Nilai di Lingkungan Sekolah

Menurut Hawkes (2003), pendidikan nilai di sekolah pada dasarnya adalah “proses bagaimana suatu nilai yang diyakini dan dipercaya, kemudian diimplementasikan kedalam seluruh aspek kehidupan di sekolah”. Artinya pendidikan nilai, bukanlah sebatas untuk menjelaskan pertanyaan “what” dari suatu nilai, tetapi lebih esensial dari itu adalah menjelaskan pertanyaan “why”, yaitu bagaimana sebuah proses nilai itu dijalankan. Tanpa bermaksud mengesampingkan eksistensi pembelajaran formal berbasis nilai, langkah-langkah implementasi pendidikan nilai yang dapat dipertimbangkan, adalah: Pertama, pendidikan nilai sebagai program pembimbingan/pembinaan siswa. Artinya pendidikan nilai tidak hanya dipandang sebagai mata pelajaran atau subjek terpisah yang ada dalam kurikulum, namun lebih sebagai sebuah etos pembimbingan /pembinaan mental anak. Karenanya penting untuk dikembangkan lingkungan pembelajaran di sekolah yang dilandasi oleh nilai dan moral seperti sikap hormat dan menghargai, tanggung jawab, disiplin, keteguhan, toleransi, kedamaian, dan kasih sayang.Dalam kaitan ini

Patmonohadi (2012) menegaskan "lebih dari pada sekedar sebuah mata pelajaran, pendidikan nilai haruslah berupa sebuah sikap yang secara sengaja ditransformasikan kedalam seluruh aspek kegiatan sekolah baik kurikuler maupun ekstra kurikuler dengan melibatkan seluruh warga sekolah, wali murid, dan lingkungan sekitar sekolah".

Kedua, mengintegrasikan pendidikan nilai dan moral kedalam setiap proses belajar mengajar sehingga guru memiliki perspektif nilai-moral dalam mendesain aktivitas kependidikan mereka. Terkait pentingnya langkah kedua ini, Ki Supriyoko mengemukakan sejumlah alasan: (1) Moral pada dasarnya merupakan perilaku, bukan pengetahuan; (2) Beban kurikulum di SD, SMP, SMA/SMK sudah sangat berat; (3) Pendidikan moral bukan tanggung jawab satu-dua guru pembina mata pelajaran saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama; dan (4) Adanya beberapa mata pelajaran yang dapat mengakomodasikan pemberian pendidikan nilai dan moral tersebut. Selanjutnya untuk memperoleh hasil nyata sebagaimana yang diharapkan, Combes (2003) menegaskan bahwa "pendidikan nilai harus dirancang sebagai sebuah proyek sekolah, terintegrasi dalam setiap aspek kurikulum, kependidikan dan aktivitas belajar mengajar, melibatkan seluruh staf pengajar atau guru, organisasi/yayasan sekolah dan para pembuat kebijakan yang bekerja bahu membahu sebagai sebuah tim".

Dalam kaitannya dengan langkah kedua ini, juga harus dicek keseluruhan kurikulum dan memikirkan bagaimana penekanan nilai dapat dilakukan dalam berbagai mata pelajaran yang berbeda, kedalam sains atau pengetahuan alam, bahasa, seni, dan mata pelajaran lainnya.

Prosesnya tidak pada bagaimana menanamkan nilai kepada para siswa atau individu, namun lebih kepada proses menggali atau mengeksplorasi

dan mengembangkan nilai-nilai yang memang sudah ada dan atau diwariskan pada masing-masing individu tersebut. Persoalan yang sering timbul adalah keterbatasan waktu belajar yang ada untuk menyelipkan pengajaran tentang nilai. Sehingga ada kecenderungan untuk menjadikan nilai sebagai sebuah mata pelajaran atau subyek khusus atau sekolah mengalokasikan waktu tertentu, misalnya pagi hari sebelum pelajaran di kelas dimulai, untuk membahas persoalan tentang nilai. Yang perlu diingat, pengajaran nilai dengan cara tersebut biasanya kurang efektif, jika dalam prosesnya tidak disertai dengan penciptaan lingkungan belajar berbasis nilai.

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah, pada taraf tertentu diperlukan adanya training, pelatihan dan berbagai kegiatan pengembangan untuk mendukung ketrampilan dan teknik mengajar guru yang dapat mendukung pembentukan lingkungan belajar berbasis nilai. Kesadaran pendidik terhadap nilai-nilai mereka sendiri akan menunjang para guru untuk membawanya lebih lanjut kedalam ruang kelas, sehingga suasana penuh nilai akan lebih terbangun, daripada hanya sekedar memberlakukan aturan yang ketat dan kaku, yang wajib dipatuhi oleh seluruh siswa. Seperti ditegaskan oleh Combes (2003) bahwa "Ide keseluruhan dari pendidikan berbasis nilai adalah guru pertama-tama melihat ke dalam diri mereka sendiri terlebih dahulu" atau memulai proses "pemahaman diri dengan melakukan penelusuran ke dalam diri lewat pengetahuan, perenungan dan sikap kritis terhadap diri sendiri" (Delors, 2007).

Secara konseptual pendidikan nilai di sekolah memberikan perspektif positif dan harapan akan terjadinya transformasi nilai-nilai kepada anak didik. Akan tetapi implementasi pendidikan nilai di sekolah, keadaannya

kurang lebih sama dengan kondisi pelaksanaan pendidikan nilai di keluarga.

Eksistensi penanaman nilai-nilai, norma dan moral kepada anak didiktereduksi dengan kepentingan sekolah untuk mengejar capaian prestasi akademik siswanya. Seluruh program sekolah mulai dari program intra kurikuler seperti: pengembangan kurikulum, penyusunan silabi dan materi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran antara guru-siswa, refleksi dan evaluasi pembelajaran maupun program ekstra kurikuler seperti program berbasis bakat-minat, hampirsemuanya didesain hanya untuk mengejar prestasi-prestasi formal baik akademik maupun non akademik yang tinggi bagi siswa-siswanya.

Data empiris di sekolah menunjukkan bahwa hampir semua kepala sekolah disibukkan untuk menyusun rencana strategis dan program dengan target-target prestatif formal institusional dimaksud, bukan target substansial pendidikan sesuai standart pendidikan yang ada. Sementara itu para guru hanya sibuk menyiapkan dokumen administrasi sertifikasinya, bahan ajarnya, menghabiskan target materinya, dan mengarang simbol-simbil pencapaian prestasi akademik siswa atas mata peajaran yang dibimbingnya daripada membimbing dan mendidik siswan secara komprehenship. Para guru kurang respek, kurang peduli, enggan menegur anak didiknya yang berperilaku tidak sopan dan mengabaikan nilai-norma-moralitas yang ada, bahkan abai dan cuek begitu saja meskipun siswanya sudah jelas melanggarnilai-norma-moral yang ada.

Keadaan ini diperparah dengan keberadaan mata pelajaran pendidikan nilai (seperti Pendidikan Agama dan PKn) yang hanya disejajarkan dengan muatan lokal atau nilai-nilai itu hanya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran

PKn dan Pendidikan Agama. Pengintegrasian secara terbatas juga terjadi pada mata pelajaran IPS, Kesenian, dan Bahasa Indonesia. Keadaan semakin menyedihkan karena proses pembelajaran dan ukuran ketercapaiannya hanya dilihat secara akademik, sehingga anak-anak tidak mengalami proses berbudi pekerti sebagai kesatuan pengalamannya secara konkrit dan komprehensip.

Realita Pendidikan Nilai di Lingkungan Masyarakat

Selain institusi keluarga dan sekolah, masyarakat juga memiliki peran dan tanggung jawab besaratas terselenggaranya pendidikan nilai yang diperlukan untuk kehidupan bersama di masyarakat seperti nilai-nilai: kesucilaan, kesopanan, kemanusiaan, toleransi, kebersamaan, perdamaian, kasih-sayang, kebenaran, keadilan, kesatuan dan lain sebagainya. Eksistensi dan pengembangan nilai-nilai dimaksud diperlukan sebagai acuan, orientasi, sandaran, dan pengikat kehidupan bersama masyarakat. Penanaman nilai-nilai dimaksud, biasanya dilakukan dengan cara memperkuat pranata sosial yang ada seperti : menjunjung tinggi nilai-nilai dasar disepakati, memperkuat perangkat nilai yang ada, mengembangkan sistem dan kelembagaan nilai yang diperlukan baik melalui pemasyarakatan, pembiasaan, pembudayaan, penjagaan termasuk di dalamnya melalui keteladanan dari segenap stakeholders masyarakat.

Masyarakat memang memiliki peran yang strategis untuk ikut serta menciptakan lingkungan dan kondisi tata pergaulan yang baik, sebagai acuan kehidupan bersama warganya termasuk generasi muda. Masyarakat dalam hal ini adalah berbagai komponen masyarakat (individu anggotanya, para tokohnya, dan unit-unit kelembagaan yang ada didalamnya) dan paranata sosial yang dimilikinya (kelembagaan

nilai, sistem nilai, nilai-nilai dasar). Optimalisasi peran masyarakat dalam pendidikan nilai dimaksud sangat membantu proses pendidikan nilai dan penanaman moral (akhlak) baik yang berlangsung di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Keberadaan ideal masyarakat Indonesia dengan perangkat dan pranata nilai “ketimuran” yang luhur sebagaimana dimaksud, saat ini memang sedang menghadapi tantangan yang serius. Desakan arus globalisasi dan berbagai paket kebijakan reformasi (dengan prinsip liberalisnya) baik pada bidang ekonomi, sosial maupun politik oleh pemerintah sejak krisis 1998, disamping memberikan dampak positif ternyata juga memberikan efek negatif dengan berkembangnya nilai-nilai baru yang bersifat individualis, materialis, pragmatis bahkan hedonis. Nilai-nilai baru tersebut kemudian mereduksi keberadaan nilai-nilai yang selama ini berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga mempengaruhi pranata dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat menjadi semakin individualis, a-sosial, acuh tak acuh, dan tidak peduli dengan gejala demoralisasi dan dehumanisasi yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Keadaan tersebut diperparah dengan fenomena berikut : (1) krisis keteladanan dari para elite, baik elite politik, sosial maupun agama; (2) krisis nilai dan norma baik nilai-norma agama, nilai-norma hukum, nilai-norma kesusilaan maupun nilai-norma sosial lainnya; (3) perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama televisi, internet, dan media sosial lainnya.

Kondisi kacau tersebut menjadi ancaman sekaligus menjebak masyarakat kedalam hutan belantara keganasan social yang dapat merenggut identitas, mentalitas dan moralitas warganya termasuk generasi mudanya. Sementara sebagian kecil anggota

masyarakat yang bermampuan dalam menata kehidupannya semakin tidak peduli, acuh tak acuh dan cuek terhadap kelompok masyarakat lainnya. Semua fakta tersebut menunjukkan anggota masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak seolah-olah berkesendirian dalam keramaian. Mereka tidak mengetahui bagaimana harus menjaga diri dan mempertahankan eksistensi dirinya. Mereka harus berjuang sendiri dan menemukan sendiri standar nilai – norma – moral sebagai landasan untuk membangun jati diri, mentalitas dan moralitasnya. Karena itu mendesak untuk dilakukan reorientasi bahkan kalau perlu rekonstruksi atas bangunan pendidikan nilai yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat.

Bagaimana Seharusnya Pemerintah Mengambil Peran?

Demoralisasi dan dehumanisasi adalah krisis serius yang bisa mendegradasikan keberadaan bangsa ini kedalam kehidupan bangsa yang terbelakang sebagaimana keberadaan bangsa-bangsa terbelakang lainnya. Penyakit sosial tersebut dapat diibaratkan seperti kanker kronis seseorang yang tidak saja membutuhkan langkah injeksi tetapi mendesak untuk diamputasi atas bagian-bagian tertentu yang memang mengancam kelangsungan hidupnya. Sejumlah langkah dapat dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat bangsa ini, diantaranya:

Pertama, perlunya gerakan oleh segenap komponen masyarakat bangsa ini dalam arahan pemerintah untuk menyatakan perang dengan penyakit sosial tersebut dengan menegaskan, menegakkan dan memastikan kembali dilaksanakannya sistem nilai yang disepakati baik pada tingkat negara maupun masyarakat sebagai standar nilai-norma-moral perilaku segenap komponen masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti

bahwa sistem nilai yang selama ini ada baik yang bersumber dari agama, adat, pranata hukum, dan pranata sosial lain yang disepakati harus menjadi landasan berperilaku;

Kedua, perlunya gerakan oleh segenap komponen masyarakat bangsa dalam inisiatif pemerintah untuk menjamin adanya kepastian dan tegaknya hukum serta nilai dan norma yang selama ini berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sistem hukum dan norma yang telah dibuat pada dasarnya dimaksudkan untuk memelihara dan merealisasikan sistem nilai yang selama ini diyakini dan junjung tinggi oleh masyarakat. Karena itu menjunjung tinggi kepastian dan tegaknya hukum atau norma yang ada berarti menjaga keberadaan dan keberlangsungannya sistem nilai yang ada. Praktek jual beli perkara dan segala bentuk praktek mafia hukum lainnya yang selama ini menjadi standar praktek hukum yang ada harus menjadi agenda besar yang harus diperangi bersama.

Ketiga, menggerakkan kembali sistem kelembagaan masyarakat yang berfungsi untuk membina dan melakukan transformasi nilai dan moralitas yang ada. Lembaga-lembaga yang memiliki tradisi sekaligus otoritas untuk menjaga dan melakukan transformasi nilai dan moral harus disupport dan didorong dengan menyediakan kebijakan pendukungnya agar mampu melakukan fungsinya secara optimal. Lembaga-lembaga yang berbasis agama, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga sosial kemasyarakatan dan sosial kepemudanaan diharapkan kembali melakukan fungsinya baik secara langsung maupun tidak langsung turut menjaga sistem nilai dan pranata social yang telah disepakati bersama.

Akhirnya harus dikatakan bahwa krisis demoralisasi dan dehumanisasi dalam konteks pembangunan bangsa ini, bukan lagi

sekedar eksekusi dari proses modernisasi dan kemajuan bangsa, tetapi sudah berubah menjadi ancaman bagi kelangsungan peradaban bangsa ini. Oleh karena itu gerakan bersama untuk menyatakan perang terhadap segala tindak dan perilaku yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecenderungan demoralisasi dan dehumanisasi pada seluruh lapisan masyarakat yang ada harus menjadi agenda strategis pemerintah bersama masyarakat.

KESIMPULAN

Krisis nilai dan moral sebagaimana tergambar dalam fenomena demoralisasi dan dehumanisasi memang sedang melanda negeri ini. Maraknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, pembunuhan, perkelahian, tawuran, penganiayaan, penipuan, penyuapan, penggelapan, mafia hukum, makelar kasus dan krisis nilai serta moral lainnya bukanlah tanpa sebab. Disamping faktor eksternal bernama globalisasi, diyakini bersama pasti ada masalah dengan keberadaan pendidikan nilai dan moral yang selama ini berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Eksistensi dan peran pendidikan nilai dan moral di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat memang mendesak untuk dikaji ulang dan dikembalikan pada fungsi dan peran yang sebenarnya.

Keluarga tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpulnya anggota keluarga untuk istirahat ketika malam tiba, apalagi hanya menjadi simbol keterikatan anggota keluarganya termasuk anak-anak. Kehadiran orang tua sebagai anggota utama keluarga, yang memiliki peran pertama dan utama dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan nilai dan moral bagi anak-anak harus benar-benar difungsikan kembali. Sementara itu lingkungan sekolah seharusnya tidak hanya memproduksi prestasi akademik dan prestasi non akademik lainnya, tetapi

menjadi lahan subur persemaian pendidikan nilai dan moral siswa secara terintegrasi melalui berbagai program akademik maupun non akademiknya. Sedangkan lingkungan masyarakat diharapkan menjadi pengikat, penjaga dan lahan subur keberadaan pranata nilai yang dijadikan sandaran dan orientasi oleh anggotanya termasuk anak-anak.

Disinilah pentingnya peran pemerintah untuk membimbing dan mengawal proses transformasi nilai baik yang berlangsung melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Melalui kebijakan dan regulasinya, diharapkan pemerintah dapat melindungi, menjaga dan memberikan jaminan bagi persemaian nilai dan moral untuk masyarakat umumnya dan generasi muda termasuk anak-anak pada khususnya. Sementara para elite dan segenap stakeholders pendidikan nilai dan moral seperti orang tua, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan contoh dan keteladanan yang terbaik. Karena dengan perbuatan dan perilaku para elite, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, anggota masyarakat dan generasi muda termasuk anak-anak diharapkan akan menirunya dan sedikit-demi sedikit diarahkan untuk lebih memberikan penghayatan melalui tindakan, pemahaman, kesadaran. Jadi upaya mendidik moral melalui menanamkan nilai-nilai moral, bukan mengajarkan nilai moral tanpa didukung penghayatan, pemahaman, dan kesadaran atau hanya pada tataran kognitif semata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hufad. 1997. *Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap Sosialisasi dan Perkembangan Kepribadian Anak*. (h.18-20).
- Ahmad Syalabi. 1987. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hal 57

- Badru Zaman dkk. 2008. *Media dan Sumber Belajar TK*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Combes, Bernard. 2003. *Global Perspectives on Values Education*. Disampaikan pada Simposium bertajuk Giving Value to Values Education, Hong Kong, Oktober 2003
- Delors, Jacques, et al. 1996. *Learning: The Treasure Within*. Laporan Komisi Internasional Pendidikan Abad 21 kepada UNESCO, UNESCO Publishing, ISBN 0-7306-9037-7.
- Hawkes, Neil. 2003. *How to inspire and develop Positive Values in your classroom*. Diterbitkan oleh LDA, ISBN 1-85503-371-2.
- Pramonoadi. 2012. *Model Pembelajaran Berbasis Nilai Living Value Di Sekolah Full Day Berbasis Islam*. UPBJJ-UT Surabaya.
- Sugihartono dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Suyanto. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.